

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada
- Dwiyanto, 2004. *Tata Pengelolaan Pemerintahan yang Baik*. CV. Bina Cipta Pustaka Press, Jakarta.
- Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung : CV Alfabeta,
- Jimli Asshidiqie, 2005, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Kopress,
- Jimly Asshidiqie, 2010, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Johni Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang ; Banyumedia Publishing
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Studi Efektivitas Sistem Rekrutmen dan Seleksi Hakim Konstitusi Republik Indonesia”, Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2017, Jakarta,
- Komisi Yudisial, 2013, *Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial RI
- Komisi Yudisial, 2014, *Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*, Sekertasi Jendral Komisi Yudisial RI,
- Loina Lalolo Krina P, 2003, “Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparancy dan Partisipatif”, Sekretariat Good Public Governance BAPPENAS, Jakarta,
- Miriam Budiardjo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Mustafa Abdullah, 2009, *Kewenangan Mengusulkan Calon Hakim Agung dan Kontribusinya dalam Menciptakan Hakim Agung yang Progresif, dalam Komisi Yudisial*.
- Ridwan HR, 2011, *Hukum Adeministrasi Negara*, Cet7, Jakarta : PT Raja Grafindo,

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:Universitas Indonesia

SoejonoSukanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia Press

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian hukum Normatif*, cetakan ke-8, Jakarta : PT . Raja Grafindo Persada

Sumarto, 2003. Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, Yayasan Obor, Jakarta.

Sri Soemantri, 2007, Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, makalah, Dialog Hukum dan Non Hukum Penataan State Auxillary Bodies dalam Sistem Ketatanegaraan, Surabaya: Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga,

Sri Soemantri, 2010, Kedudukan, Wewenang dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, dalam *Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI

Sugiyono, 2019, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta

B. Jurnal

Achmad Edi Subiyanto, 2012, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945”, Jurnal Konstitusi 9 (4),

Bambang Sutiyoso, 2011, *Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 18, No. 2

Dingga Aldhy Mahendra, 2022, Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 5 No 3,

Hafid Irfani, 2024, Prinsip Keterbukaan Dan Akuntabilitas Dalam Pengangkatan Penjabat (PJ) Kepala Daerah, *Jurnal Hukum*, Volume 6 No 2,

H. Ismail MZ, 2022, KETERLIBATAN Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi Di Tinjau dari Perspektif Hukum Tatat Negara Indonesia, *Jurnal Ganec Swara*, Volume 16 No 1,

Ika Atikah, 2017, *Pembentukan Komisi Yudisial Sebagai Upaya Independensi Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum dan Politik Vol. 8 No. 1,

Jawahir Thontowi, 2011, *Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jurnal Hukum No. 2 Vol.

Mei Susanto, 2017 “Revitalisasi Peran Publik Dalam Pengangkatan Calon Hakim Agung”, Jurnal Peradilan Indonesia 6,

Muslim, Entin Sriani, 2006, ‘Advokasi Pembuatan Citizen Charter untuk Mendorng Pelayanan Publik yang Transparan, Akuntabel dan Responsif’, Balai Diklat LAN, Jurnal Demokrasi 1.

Nurhalimatuz Zahro, 2021, Pola Ideal Rekrutmen Hakim Agung Oleh Komisi Yudisial Ke Depan, *Jurnal USM Law Review*. Vol 4, No 1,

Nurul Chotidjah, 2010, Eksistensi Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka, *Jurnal FH.UNISBA*. Vol XII No 2,

Sri Nur Susanto, Metode dan Batas-Batas Wewenang Pemerintah, Jurnal Administrasi Law and Governance, Vol.3 No 3

Suparto, 2017, *Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Perbandingan dengan Komisi Yudisial di Beberapa Negara Eropa*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 47 (4),

C. Peraturan Perundang – undangan

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

Pengaturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2014

Pengaturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016

D. Putusan Pengadilan

Putusan PTUN JKT Nomor : 270/G/2018/PTUN-JKT

Putusan MK Nomor : 27/PUUXI/2013

E. Website

Alasan KY Loloskan Calon Hakim Agung yang tak Penuhi Syarat Administratif
<https://www.hukumonline.com/>

Bachrudin Mustafa, 'Akuntabilitas, Transparansi dan Produktifitas Kinerja' ,
(Bachrudin Musthafa, 2016)
<<http://bachrudinmusthafa.staf.upi.edu/2016/04/10/akuntabilitas-transparansi-dan-produktivitas-kinerja/>> ,

Dario Castiglione, Accountability Social Science, <https://www.britannica.com/>.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, Sejarah Pembentukan Komisi Yudisial,
<https://komisiyudisial.go.id/>.

Komisi Yudisial, *Lahir dari Reformasi KY dan HCJ Fokus Kembalikan Kepercayaan Publik*, <https://komisiyudisial.go.id/>.

Kompas.com, Hakim Agung: Syarat, Seleksi, dan Tugasnya,
<https://www.kompas.com>

Kompas.com, Masukan Publik jadi Salah Satu Pertimbangan Pilih Hakim Agung, <https://www.kompas.id/>

Transparansi Seleksi Hakim <https://www.tempo.com>

F. Laporan Lembaga Pemerintah

Komisi Yudisial Republik Indonesia, Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2022

G. Pengumuman

Komisi Yudisial Republik Indonesia Pengumuman Nomor : 19/Siaran Pers/AL/LI.04.01/7/2019 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2019, hlm 3

Komisi Yudisial Republik Indonesia Pengumuman Nomor : 10/PENG/PIM/RH.01.02/12/2021 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2021, hlm 1

Komisi Yudisial Republik Indonesia Pengumuman Nomor : 09/PENG/PIM/RH.01.02/06/2023 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2023, hlm 1

Komisi Yudisial Republik Indonesia Pengumuman Nomor : 17/SIARAN PERS/AL/LI.04.01/08/2022 Tentang KY Kembali Buka Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim ad hoc di MA Tahun 2022 Hlm 1

H. Putusan Pengadilan

Putusan PTUN JKT Nomor : 270/G/2018/PTUN-JKT

Putusan MK Nomor : 27/PUUXI/2013

